

MENILAI KEBERHASILAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES): VALIDASI MODEL KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI DELONE DAN MCLEAN

Sigit Kurnianto¹
Deddy Kurniawansyah
Wulandari Fitri Ekasari

ABSTRACT

This study aims to test the success Siskeudes by developing a successful model of the DeLone and McLean information systems into seven dimensions. The population was 151 siskeudes operatos in the village governments Gresik, Nganjuk, Situbondo. The sampling used in this study a sensus method. Source of data is primer data, obtained questioner from respondend. This study used structural equation modeling (SEM). The results obtained in this study is system quality has a effect on system satisfaction, information quality has a effect on information satisfaction, usefulness has a effect on system satisfaction and information satisfaction, system satisfaction has effect on individual impacts, information satisfaction has a effect on conflict intentions, individual impacts has a effect on organizational impacts, except information quality to usefulness, system quality to information satisfaction, usefulness to individual impacts, usefulness to organizational impact, system satisfaction to organizational impact, information satisfaction to organizational impact. In addition, the test results show that there are nine pathways that have additional influence through indirect pathways. This finding becomes the basis for the development of a successful model of information systems in eGovernment, for regulators to develop and manage strategies for implementing the Siskeudes application, and as a guide for evaluating the success of Siskeudes.

ARTICLE INFO

Article History:

Received 19 August 2019

Accepted 11 October 2019

Availabe online 30 November 2019

Keyword : Siskeudes, Delone, Mclean

Pendahuluan

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (BPKP, 2015). Kewenangan yang diberikan undang-undang, desa harus mampu melakukan secara mandiri pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa tidak mengelola dana kecil, melainkan saat ini mengelola dana besar, sehingga dipelukan

¹ Corresponden Author : Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya
Telp. 082139997711
Email : sigit-k@feb.unair.ac.id

kompetensi memadai dan integritas yang baik dalam mengelola dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan desa wajib menyusun Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban APBDesa, meliputi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I yang Disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran (gabungan semester 1 dan Akhir Tahun), dilampiri Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, membuat laporan pertanggungjawaban per sumber dana berdasarkan aturan dari pemberi dana seperti Dana Alokasi Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah harus menjaga kepercayaan publik dengan lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang secara umum selalu berubah (Smith, 2016). Tata kelola keuangan dan sistem pemerintah desa yang baik menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Pada tahun 2015 berdasarkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mensikapi kebutuhan ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Sistem Keuangan Desa yang awalnya diberi nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa yang merupakan turunan dari SIMDA yang sudah dikembangkan sebelumnya. Setelah kerja sama dengan Kemendagri, sekarang sistem dalam bentuk aplikasi tersebut menjadi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi siskeudes didesain untuk memenuhi kebutuhan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Desa dengan memiliki keunggulan yaitu sesuai dengan regulasi yang berlaku, memudahkan tatakelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi (*user friendly*), *built-in internal control*, kesinambungan dalam *maintenance*, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi (BPKP, 2016).

Kesuksesan dalam membangun dan penerapan aplikasi sistem informasi diukur dengan tercapainya tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut secara efisien dan efektif. Kualitas sistem yang lebih tinggi diharapkan dapat menghasilkan kepuasan pengguna yang lebih tinggi dan penggunaanya akan membawa dampak positif pada produktivitas individu, sehingga berakibat pada peningkatan produktivitas untuk mencapai tujuan organisasi (DeLone dan McLean, 2003). Analisis keberhasilan sistem informasi dengan studi empiris perlu dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem informasi, serta menemukan atau mengembangkan model sebagai kerangka pembuatan atau perbaikan sistem informasi. Kesuksesan Sistem Informasi adalah sebuah konstruksi multidimensi dan saling bergantung dan oleh karena itu perlu dipelajari keterkaitan antar dimensi atau untuk mengendalikan dimensi tersebut (DeLone dan McLean, 2003).

